PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE(SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Abdullah[1*], Samsudin [2], Ilyas[3], Khairul Ihwan[4]

[1,2,3,4]Universitas Islam Indragiri
*E-mail: samsudinsadek@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Statistik mendorong kepada Instansi atau OPD(Organiasi Pemerintah Daerah) mengikuti perkembangan Teknologi aplikasi, untuk saat ini sistem informasinya masih berdiri sendiri di masing masing Instansi atau OPD dan belum Terintegarasi dalam satu *Server*, data dan Informasi hanya OPD yang punya atau yang mengetahui, hal ini berdampak pada kualitas informasi yang dihasilkan, efesiensi anggaran. untuk itu Dinskominfopers mendorong untuk dibuatkan SPBE yang terintegrasi yang sesuai dengan Peraturan. Untuk itu dilakukan pendampingan dalam penyusunan dan pengisian Arsitektur SPBE yang terdiri dari 6 poin yaitu: Domain layanan SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain data dan Informasi, Domain Infrastruktur SPBE, Domain Keamanan SPBE. Dalam penyusunan Arsitektur SPBE, staf OPD mengisi data Arsitektur SPBE dengan *Tamplate Excel* yang sudah disediakan Sistem, setelah mengisian data di Excel kemudian File tersebut diUpload di Sistem Informasi Arsitektur SPBE yang berbasis *Web*. Adapun sumber data Dalam pengisian *Tamplate Excel* adalah Renstra/RPJMD. Dengan adanya pendampingan ini dapat mengurangi kesalah pengisian dan mempercepat penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata kunci: SPBE,OPD, Data, Informasi, RPJMD

ASSISTANCE IN THE PREPARATION OF SPBE(ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM) ARCHITECTURE INDRAGIRI HILIR DISTRICT

ABSTRACT

The Indragiri Hilir Regency Government through the Communication, Information and Statistical Coding Service encourages agencies or OPD (Regional Government Organizations) to follow developments in application technology, currently the information system still stands alone in each agency or OPD and is not yet integrated into one server, data and Only OPD has or knows information, this has an impact on the quality of the information produced and budget efficiency. For this reason, Dinskominfopers encourages the construction of an integrated SPBE that complies with the regulations. For this reason, assistance is provided in preparing and filling in the SPBE Architecture which consists of 6 points, namely: SPBE service domain, Business Process Domain, Data and Information Domain, SPBE Infrastructure Domain, SPBE Security Domain. In preparing the SPBE Architecture, OPD staff fills in the SPBE Architecture data with the Excel Template provided by the System. After filling in the data in Excel, the file is then uploaded to the Web-based SPBE Architecture Information System. The data source for filling in the Excel template is the Strategic Plan/RPJMD. This assistance can reduce filling errors and speed up the preparation of the SPBE Architecture for Indragiri Hilir Regency.

Keywords: SPBE,OPD, Data, Information, RPJMD

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 18.812,92 Km2 yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 Km2, luas perairan laut 6.318 Km2 dan luas perairan umum 888,97 Km2 serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 Km2, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan , Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Kabupaten Jambi, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “Pintu gerbang Timur Sumatera “ dalam berbagai aktifitas pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis elektronik (SPBE) dan mematuhi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Pemerintah perlu melakukan standarisasi terhadap perancangan SPBE agar dapat terimplementasi dan terintegrasi dengan baik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Salah satu kerangka kerja yang bisa digunakan untuk merancang Arsitektur SPBE yaitu menggunakan Enterprise Architecture(Wulandari et al., 2021), dan juga Togaf Framework(Laksono, 2022) dan (Yustisiawandana & Aji, 2024), Togaf ADM(Syahruni Qotrunnisa, 2021) dan (Niniekasari & Firmansyah, 2023), ada juga menggunakan perancangan Arsitektur Enterprise pada domain arsitektur data menggunakan best practice DAMA DMBOK(Hadi et al., 2021).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaran pemerintah yang memanfaatkan penggunaan teknologi infomasi dan komunikasi kepada pengguna SPBE secara Integrasi(Saputra et al., 2020). SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kota yang bersih(Kuru et al., 2021), efektif, transfaran dan akuntabel, berkulitas, terpercaya (Choirunnisa et al., 2023) dan juga untuk meningkatkan aksebilitas layanan publik (Prawira & Paraniti, 2023).

Permasalah yang terjadi dikabupaten Indragiri hilir belum adanya Masterplan Arsitektur SPBE yang memberikan arah Kompas Pembangunan sistem elektronik, sehingga dalam Pembangunan aplikasi dan infrastruktur elektronik masing masing OPD(Organisasi Perangakat Daearah) sehingga aplikasi yang berjalan sendiri sendiri yang tidak terintegrasi satu sama lainnya dan ini dinilai sistem pemerintahan kurang efektif dan kurang efesien.sehingga dalam Pembangunan jangkat Panjang serta tidak memiliki arah dan petunjuk yang jelas. Dan bagaimanapun juga akan menghambat Pembangunan dan kemajuan kabupaten indragiri hilir.

Maksud penyusunan Arsitektur SPBE adalah memberikan gambaran kondisi pelaksanaan pemerintah saat ini dan arahan dalam membangun, mengimplementasikan dan mengembangkan SPBE jangka panjang agar efektif dan efisien dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir menuju *Kabupaten yang sangat baik*. Meningkatkan mutu layanan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas dan terpercaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Memperbaiki organisasi,

sistem manajemen, dan sistem kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, terpadu dan terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Manfaat dari penyusunan Arsitektur SPBE ini adalah menjadi dasar dan memberikan arah dalam pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk jangka panjang serta memberikan andil dalam peningkatakan kualitas layanan kepada masyarakat.

METODE

1. **Seminar SPBE**
   Melakukan Pemaparan, diskusi Arsitektur SPBE dengan pihak pihak terkait seperti OPD, Praktisi dan akademisi
2. **Pendampingan Penyusunan SPBE**
   Melakukan pendampingan Penyusunan SPBE Kepada OPD dengan cara mengidenfikasi kondisi sistem yang ada di OPD dan Rencana Pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seminar Arsiktur SPBE

dalam kegiatan pendampingan dalam penyusunan masterplan SPBE dilakukan diskusi dan seminar penyatuan pesepsi guna menyamakan pesepsi, pada Gambar 1, dapat dilihat Diskusi dan Seminar dengan pihak pihak yang terkait seperti Inspektorat, Kepala Dinas, Sekretarian Daerah,Sekretarian Dewan dan Akademisi, dalam seminar dilaksanakan beberapa kali guna mendapatkan satu persepsi dalam Pembangunan Arsitktur SPBE.

Gambar 1. Seminar SPBE Bersama Stakeholder dan Akademisi

Dalam rangka melaksanakan prioritas agenda pembangunan (pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi) perlu ditentukan meteoda pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut secara cepat, tepat, dan terukur. Penerapan SPBE dalam menyenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawan tuntutan tersebut. Salah satu komponen utama SPBE, yaitu arsitektur SPBE, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan semua area dan tingkatan. Dalam pelaksanaan SPBE, arsitektur SPBE dikelompokkan menjadi:

(1)Arsitektur SPBE Nasional.(2)Arsitektur SPBE Instansi Pusat. (3)Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah.

Pemahaman terhadap misi penerapan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Indragiri Hilir dapat dimaknai bahwa SPBE diharapkan memberikan solusi bagi(Putri et al., 2021):(1)Ketersediaan infrastruktur jaringan;(2)Ketersediaan dukungan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan *(e- government)* baik yang berorientasi pada hubungan *G-to-G, G-to-B*,maupun *G-to-C*;(3)Ketersediaan sarana diseminasi informasi dan edukasi publik guna mendorong pemanfaatan SPBE yang beretika dan bertanggung jawab. Pembentukan organisasi atau kelembagaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun jumlah Lembaga Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 adalah sebagai berikut .

Table 1. Jumlah Lembaga Pemerintahan Kab Inhil

No.	Organisasi Pemerintah Daerah	Jumlah	Satuan
1	Direktorat	-	Lembaga
2	Inspektorat	1	Inspektorat
3	Badan	7	Lembaga
4	Dinas	21	Lembaga
5	Sekretariat Daerah	1	Lembaga
6	Sekretaris Dewan	1	Lembaga

Pemerintahan di kabupaten Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Bupati/Kepala Daerah dengan satu orang Wakil Bupati. Di dalam melaksanakan tugasnya, ada 3 organisasi perangkat staf pemerintahan daerah yaitu: Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 2. MOA Diskominfopers Kabupaten Indragiri Hilir dengan Fakultas Teknik dan ilmu Komputer

Pada Gambar 2, Melaksanakan MOA Kerjasama Diskonfopers Kabupaten Indragiri Hilir dengan Fakultas Teknik dan Indragiri Hilir, kesepamahaman kerjama dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyakarat salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan pendampingan penyusunan masterplan SPBE Kab. Inhil.

Pendampingan Penyusunan SPBE

Melakukan pendampingan OPD dalam mengindetifikasi sistem yang dibutuhkan Salah satu unsur SPBE dalam kerangka keraj tersebut diatas adalah Arsitektur SPBE Nasional, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Nasional yang terdiri dari (I Made Sukarsa et al., 2020): (1)Domain arsitektur proses bisnis;(2)Domain arsitektur data dan informasi;(3)Domain arsitektur infrastruktur SPBE;(4)Domain arsitektur aplikasi SPBE;(5)Domain arsitektur keamanan SPBE; (6)Domain arsitektur layanan SPBE.Gambar keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja Arsitektur SPBE.

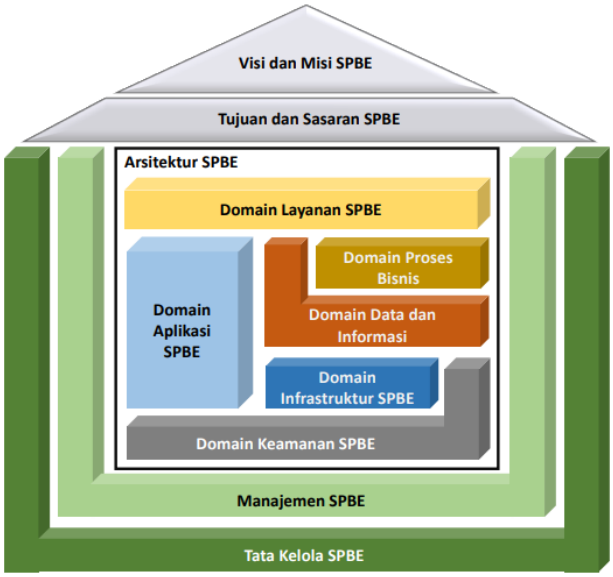

Gambar 3. Kerangka Kerja Arsitekru SPBE(SumberMenpan RB)

Pada Gambar 3, Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyenggaraan pemerintah, di mana melalui arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan. Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dann keamanan SPBE. keterpaduan

proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka kerja arsitektur SPBE dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE

Untuk Menyusun Arsitektur SPBE ada 3 Komponen penyusunnya(Arief, & Yunus Abbas, 2021), dapat dilihat pada Gambar 4.

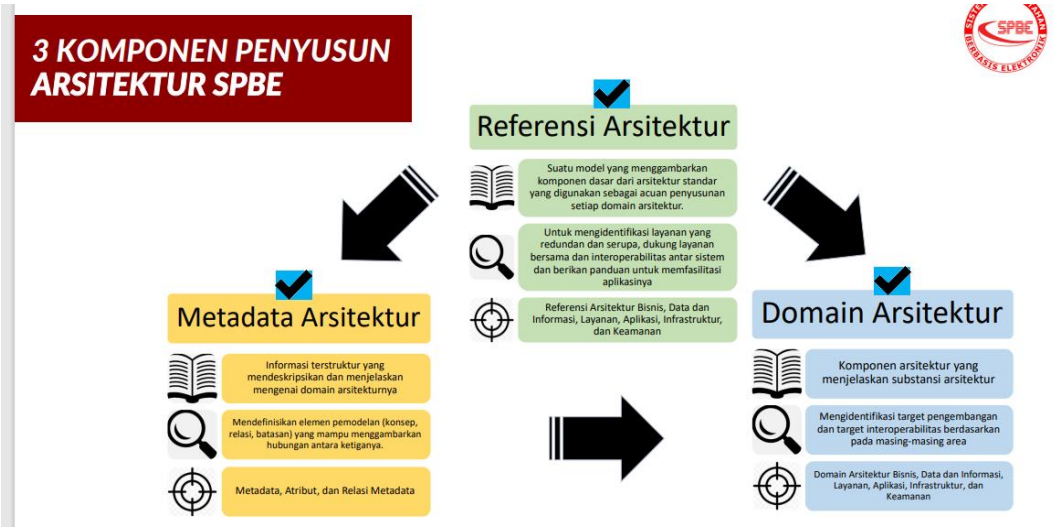

Gambar 4. Komponen Penyusun Arsitektur SPBE

Pada Gambar 4 dapat dilihat ada tiga Komponen Penyusun SPBE yang terdiri dari

1. Reverensi Arsitektur SPBE yaitu kerangka dasar mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain Arsitekur SPBE
2. Domain Arsitektur SPBE yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan subtansi arsitektur yang membuat domain arsitekru proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain Arsiktur aplikasi SPBE, Domain Arsiktur Keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.
3. Metadata Arsitektur adalah informasi terstruktur yang mendskripsikan mengenai domain arsitekturnya.

untuk mengimplementasikan penyusunan Arsitektur SPBE yang seusai dengan yang ada di dimasing masing OPD, maka dilakukan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Pendampingan OPD dalam penyusunan SPBE

Pada gambar 5, dilakukan proses pendampingan dengan OPD, dalam proses pendampingan ini dilakukan penyandingan data Renstra, sub bagian bagian yang ada pada OPD, setelah proses pendampingan maka akan menghasilkan 6 domain yaitu (1)Arsitektur Proses bisnis, (2)Domain Arsitektur layanan, (3)Domain Arsitektur Data dan Informasi, (4)Domain Arsitektur Aplikasi, (5)Domain Arsitektur Infrastruktur (6)Domain Arsitektur Keamanan. Berikut ini contoh hasil domain proses bisnis dapat dilihat pada Gambar 6.

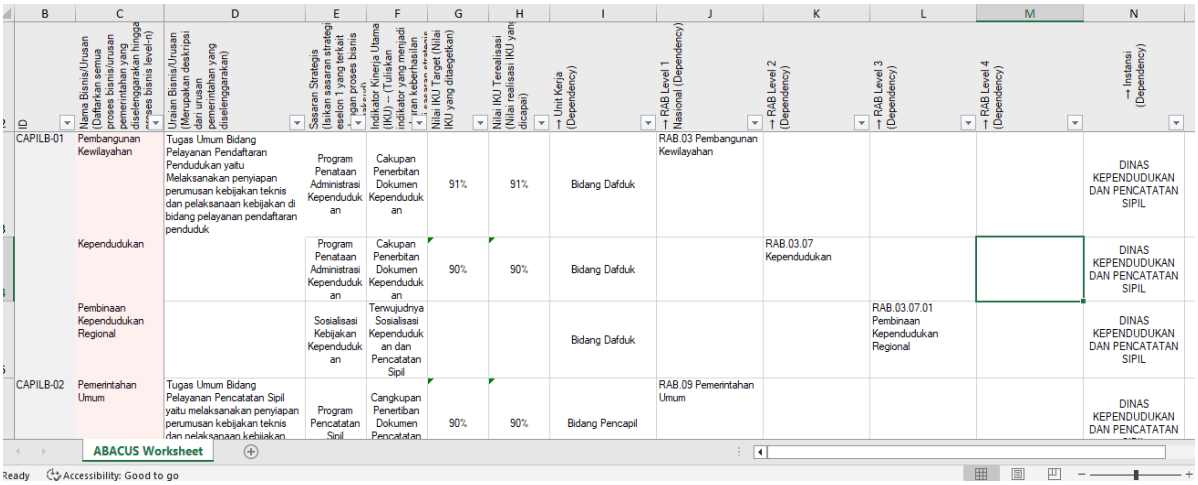

ID	Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n)	Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)	Sasaran Strategis (Isikan sasaran strategi eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis	Indikator Kinerja Utama (IKU) – (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan	Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditargetkan)	Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
CAPILB-01	Pembangunan Kewilayahan	Tugas Umum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	91%	91%	Bidang Dafduk	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Kependudukan		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	90%	90%	Bidang Dafduk		RAB.03.07 Kependudukan			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan Kependudukan Regional		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tewujudnya Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Bidang Dafduk			RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CAPILB-02	Pemerintahan Umum	Tugas Umum Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan	Program Pencatatan Sipil	Cangkupan Penertiban Dokumen Pencatatan	90%	90%	Bidang Pencapil	RAB.09 Pemerintahan Umum				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

ABACUS Worksheet

Ready Accessibility: Good to go

Gambar 6. Pengisian Domain Proses Bisnis Tamplate Excel pada DisdukCapil

Pada Gambar 6, data proses bisnis diambil dari dokumen proses bisnis yang bersumber dari Renstra DisdukCapil Kabupaten Indragiri Hillir yang data terdiri dari ID, Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n), Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan), Sasaran Strategis (Isikan

sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud), Indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang bersesuaian), Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditaegetkan), Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai), → Unit Kerja *(Dependency),* → RAB Level 1 Nasional *(Dependency),* → RAB Level 2 *(Dependency),* → RAB Level 3 *(Dependency),* → RAB Level 4 *(Dependency),* → Instansi *(Dependency).*

SIMPULAN

Dalam pendanpingan OPD dilakukan identifikasi 6 domain layanan SPBE yaitu: Domain layanan SPBE,Domain Proses Bisnis, Domain data dan Informasi, Domain Infrastruktur SPBE, Domain Keamanan SPBE. Dalam penyusunan Arsitektur SPBE, staf OPD mengisi data Arsitektur SPBE dengan *Tamplate Excel* yang sudah disediakan Sistem, setelah mengisian data di Excel kemudian File tersebut diUpload di Sistem Informasi Arsitektur SPBE yang berbasis *Web*. Adapun sumber data Dalam pengisian *Tamplate Excel* adalah Renstra/RPJMD. Dengan adanya pendampingan ini dapat mengurangi kesalah pengisian dan mempercepat penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Indragiri Hilir.

UCAPAN TERIMAKASIH (jika ada)

1. Diskominfopers yang telah memberikan waktu, kesempatan dan data yang berhubungan dengan Penyusunan Arsitektur SPBE.
2. Universitas Islam Indragiri yang telah Mendukung kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, *8*(1), 1–6. https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978

Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, *3*(1), 71–95. https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401

Hadi, I., Gumilang, S. F. S., & Nugraha, R. A. (2021). Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Data di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan. *E-Proceeding of Engineering*, *8*(5), 9098.https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/15865

I Made Sukarsa, Ida Bagus Ananda Paramartha, Anak Agung Ketut Agung Cahyawan, Kadek Suar Wibawa, Putu Gede Arya Sumertha Yasa, Ni Made Swasti Wulanyani, & Ni Wayan Wisswani. (2020). Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, *4*(2), 243–253. https://doi.org/10.29207/resti.v4i2.1825

Kuru, G. S. N., Gumilang, S. F. S., & Nugraha, R. A. (2021). Model Arsitektur Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Domain Proses Bisnis Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, *6*(2), 369–378. https://doi.org/10.29100/jipi.v6i2.2116

Laksono, A. (2022). Desain Arsitektur Enterprise Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan. *Jurnal Informatika Polinema*, *9*(1), 111–120. https://doi.org/10.33795/jip.v9i1.1155

Niniekasari, Z., & Firmansyah, G. (2023). Efektifitas Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Proses Bisnis Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon: Efektifitas Arsitektur Sistem …. *Proceeding KONIK (Konferensi …*, 255–262.https://prosiding.konik.id/index.php/konik/article/view/203%0Ahttps://prosiding.konik.id/index.php/konik/article/download/203/162

Prawira, M. G., & Paraniti, A. A. S. P. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *6*(1), 82–89. https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.828

Putri, V. D., Gumilang, S. F. S., & Nugraha, R. A. (2021). Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, *6*(2), 379–386. https://doi.org/10.29100/jipi.v6i2.2118

Saputra, M. R. Y., Winarno, W. W., & Henderi, H. (2020). Evaluasi Tingkat Kematangan Spbe Di Disperindag Kabupaten Banjar. *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, *3*(1), 7. https://doi.org/10.21927/ijubi.v3i1.1188

Syahruni Qotrunnisa, A. (2021). Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pemerintah Daerah Kuningan. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, *4*(3), 187–192. https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3424

Wulandari, D., Gumilang, S. F. S., & Mulyana, R. (2021). Perancangan Enterprise Architecture Layanan Spbe (E-Government) Di Lingkungan Pemkab Sukabumi. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)*, *8*(1), 19–26. https://doi.org/10.33330/jurteksi.v8i1.1204